

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

Pada bab ini peneliti menggunakan beberapa teori untuk mendukung masalah pada skripsi untuk panduan dalam penelitian dan mendukung masalah mengenai judul penelitian yang diangkat yaitu “Pengawasan Aktivitas Penangkapan ikan di Pangkalan Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kota Batam “

##### **2.1.1 Definisi Manajemen dalam Administrasi Publik**

Definisi Manajemen sebagai Ilmu yang masuk akal dan tersistem untuk mencapai tujuan bersama didalam organisasi secara efektif untuk menjalankan peran masing masing yang terkait pada kepentingan (NUGROHO, 2017) .

Menurut pengertian manajemen memiliki 3 definisi manajemen yaitu :

Pada Encyclopedia Of the Social Sciences Manajemen diartikan sebagai bagian dari suatu proses untuk tujuan organisasi tertentu yang di mana prosesnya diawasi (FIRMANSYAH, 2018)

Manajemen menurut Haimann Bertujuan untuk melakukan kegiatan orang lain atau aktivitas organisasi dan mengawasi usaha individu untuk mencapai tujuan bersama

George R. Terry mengartikan manajemen adalah tujuan yang sudah ditetapkan di awal atau terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain atau organisasi

### **2.1.2 Fungsi Manajemen dalam Administrasi Publik**

Fungsi manajemen bagian dasar pada proses manajemen yang menjadi ukuran manager untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya. Fungsi manajemen sebagai berikut

#### *1. Organizing (organisasi)*

Bagian kegiatan untuk melakukan penetapan suatu organisasi dan fungsi kedudukan atau unit relasi masing masing organisasi tersebut

#### *2. Forecasting*

Bagian dari kegiatan meramalkan, atau mengadakan taksiran yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dilaksanakan

#### *3. Planning*

Bagian tentang perencanaan penetapan yang harus dicapai atau penentuan perangkaian untuk mencapai hasil yang diinginkan

#### *4. Staffing atau Assembling Resources*

Luther Gulick , Harold Koontz menyatakan staffing berupa penyusunan personalia atau anggota pada organisasi sejak merekrut tenaga kerja agar setiap petugas memberikan hasil maksimal kepada organisasi.

#### 5. *Directing atau Commanding*

Fungsi yang berhubungan untuk memberi bimbingan , saran atau perintah kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar (FIRMANSYAH, 2018)

#### 6. *Leading*

Menurut pakar Lois A Allen merupakan salah satu bagian fungsi manajemen sebagai pekerjaan yang dilakukan manager yang menyebabkan orang lain untuk bertindak .

#### 7. *Coordinating*

Salah satu fungsi atau bagian dari manajemen ini disebut dengan pengendalian dan mengadakan penilaian sehingga apa yang dapat dilakukan bawahan dapat ter arah .

#### 8. *Motivating*

Kegiatan pendorong berupa pemberian inspirasi ,semangat ide kepada bawahan sehingga bawahan lebih semangat melaksanakan tugas tugas

#### 9. *Controlling*

Pengawasan penilaian dan sekaligus mendakan koreksi atau mengadakan arahan yang sedang dilakukan bawahan untuk mencapai tujuan bersama didalam suatu organisasi

#### 10. *Reporting*

Pelaporan penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan didalam suatu organisasi yang berhubungan dengan fungsi dan tugas sehingga yang menerima laporan mendapatkan hasil atau gambaran dalam memberi hasil laporan

### **2.1.3 Definisi Pengawasan**

Menurut T. Hani Handoko “Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang menetapkan standar pelaksanaan yang ditetapkan untuk tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik ,serta mengambil tindakan atau kebijakan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang digunakan di perusahaan atau organisasi cara paling efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan pada organisasi atau perusahaan (R. Pratama, 2020) dan menurut M. Manullang definisi pengawasan pekerjaan apa saja yang sudah dilaksanakan atau dilakukan dan bisa menilainya atau mengoreksinya supaya pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana semula (Suadi, 2021) Menurut Sarwoto pengawasan adalah kegiatan atau aktivitas manager yang mengupayakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang diinginkan atau dikehendaki (Suadi, 2021) lalu menurut Harold Koonz tentang pengawasan itu adalah pengukuran atau batasan dan pembetulan terhadap kegiatan atau aktifitas para bawahan untuk menjamin adanya bahwa apa yang dilaksanakan itu cocok dan sesuai dengan rencana yang diinginkan di setiap organisasi (Suadi, 2021), pengawasan pada intinya mengindari

adanya kejahatan,kecurangan ,pelanggaran yang dilakukan, karena adanya pengawasan untuk membantu pelaksanaan berjalan lancar sesuai dengan rencana karna adanya pengawasan kita bisa mengavaluasi hasil kinerja kita sejauh mana sudah dilaksanakan (Abbas, 2020)

#### **2.1.4 Tujuan Pengawasan**

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajerial sebagai salah satu fungsi managerial mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlakukan dan suatu pelaksanaan tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya dan tidak tercapainya suatu sasaran dan tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu (Suadi, 2021) Adapun menurut Ranupandojo tujuan pengawasan mengusahakan agar suatu pekerjaan terlaksana sesuai dengan tujuan yang sudah dikehendaki .untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi perlu diadakannya pengawasan karna pengawasan memiliki tujuan yang berguna bagi pihak yang melaksanakan atau menjalankan tugas dan tujuan pada pengawasan (Suadi, 2021)

Menurut para ahli termasuk Soekarno dalam Gouzali Syadam tujuan pengawasan sebagai berikut yaitu (Suadi, 2021) :

1. Untuk mengetahui pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung atau sudah berjalan sesuai dengan rencana
2. Untuk mengetahui sudakah kegiatan tersebut sesuai dengan intruksi atau arahan
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan dengan efisien
4. Untuk memahami kesulitan dan kelemahan dalam kegiatan pada organisasi
5. Untuk mencari jalan keluar atau pintas jika terjadi adanya kesulitan kelemahan atau kegiatan arah perbaikan

#### **2.1.5 Prinsip Pengawasan**

Prinsip pengawasan adalah output dari yang diinginkan makan pimpinan organisasi atau perusahaan, Prinsip pengawasan menurut Georgy R Terry dalam prinsip pengawasan yang efektif dan efisien yaitu berlangsung sesuai dengan rencana atau plan sebelumnya.

Menurut Ulbert silalahi pandangannya mengenai pengawasan yaitu:

1. Pengawasan harus dilakukan secara langsung dan berkala dalam menilai, menganalisis, objektivitas yang dilakukan didalam pengawasan
2. Pengawasan bukan menemukan suatu kesalahan dalam pengawasan tetapi menemukan kekurangan didalam pengawasan lalu di perbaiki cara kinerja pengawasan

3. Harus adanya bimbingan atau arahan dalam pengawasan
4. Tidak menghambat atau memperlambat pekerjaan tetapi harus memiliki efisiensi hasil terhadap pengawasan
5. Dalam pengawasan harus efektif dan efisien
6. Pengawasan harus memiliki tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan
7. Pengawasan dilakukan ditempat yang akan diawasi

Dari semua kegiatan pengawasan harus ada yang namanya evaluasi atau perbaikan kinerja dalam pengawasan (Suadi, 2021).

#### **2.1.6 Bentuk Bentuk Pelaksanaan dan Pengawasan**

Menurut Ahli Suwoto mengatakan ada 3 bentuk bentuk pengawasan yaitu (Fendi, 2021) :

1. Pengawasan Hukum yaitu suatu pengawasan ditujukan untuk mengetahui wewenang
2. Pengawasan Administratif yaitu bentuk pengawasan untuk mengukur efisiensi kerja
3. Pengawasan politik bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur kapasitas pada segi kemanfaatan

#### **2.1.7 Teknik Pengawasan**

Menurut Siagian, teknik pengawasan yang digunakan yaitu :

1. Pengamatan secara langsung, pengamatan ini melihat sendiri secara langsung petugas operasional mengadakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya
2. Mengenai laporan baik tulisan dan lisan dari para petugas yang mengawasi secara langsung aktivitas dan kegiatan para bawahannya
3. Penggunaan kuesioner yang *feedback* atau responnya sangat berguna dan bermanfaat jika perbaikan lebih kearah baik
4. Wawancara dengan para penyelenggara operasional untuk melakukan pengawasan.
5. Teknik pengawasan, ada yang menggunakan pengawasan kuesioner dan wawancara menggali informasi tergantung :
  - a. Kejelasan wawancara
  - b. Target waktu menentukan penyelesaian tugas
  - c. Dukungan keuangan atau dana.
  - d. Sarana dan prasana
  - e. Sifat atasan secara langsung
  - f. Standar mutu hasil pekerjaan
  - g. Toleransi terhadap deviasi yang dapat diterima

### **2.1.8 Tahapan Pengawasan**

Tahapan pengawasan ada 5 (lima) yaitu :

1. ***Planning*** yaitu perencanaan organisasi atau perusahaan membuat suatu tujuan yang akan dilaksanakan pencapaian pengawasan tersebut.  
(Poernomo, 2020)

2. **Programming** adalah tahapan pengawasan untuk mencapai agenda atau kegiatan yang sudah direncanakan dengan memilah dan membatasi hambatan atau masalah yang ada diluar organisasi (Poernomo, 2020)
3. **Result Checking** yaitu mengevaluasi tiap organisasi atau perusahaan sudah mencapai tujuan atau tidak didalam pengawasan (Poernomo, 2020)
4. **Shifting Analysis** yaitu adanya pergantian pengawasan yang direncanakan (Poernomo, 2020)
5. **Corrective action implementation** untuk melakukan efektivitas dan efisiensi agar pengawasan dilakukan secara optimal sesuai arahan dan tujuan yang direncanakan.(Poernomo, 2020)

## **2.1.9 Direktorat Jenderal Teknik Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

### **a. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan**

Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Teknik Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu mempunyai tugas sebagai pelaksanaan sesuai dengan undang undang dan kegiatan ini menjamin terciptanya tata tertib pelaksanaan ketentuan perundang undangan dibidang perikanan.pengawasan biasanya dilakukan pada saat kapal mau berlayar maka dilakukan pemeriksaan kesesuaian administrasi bukan kesesuaian administrasi saja tapi teknis dan fisik kapal ketiga kapal hendak berangkat pengawasan dilakukan apakah kapal tersebut

sudah patuh dan sesuai dengan ketentuan yang ada di SLO Surat Laik Operasi. (Purwangka et al., 2019)

#### **b. Tata Cara Pelaksanaan Tugas**

Pelaksanaan Perikanan Sebagaimana Maksud Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP 2020 pasal 2 Tentang Pengawasan Perikanan yaitu dalam melaksanakan tugasnya adalah yaitu :

1. Pembagian ,dan mengevaluasi bagian rencana suatu program yang sudah dibuat serta hasil laporan pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan .
2. Melakukan pengadaan dan pemanfaatan pada sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan
3. Adanya Suatu Penyuluhan atau proram rencana kepada masyarakat
4. Adanya persiapan dan pemeliharaan kapal pengawasan perikanan yang akan beroperasi
5. Adanya Pemanfaatan dan hasil guna pada kapal pengawasan perikanan
6. Adanya Pengolahan Prasarana dan Sarana yang sudah ditetapkan sumber daya kelautan dan perikanan
7. Urusan tentang kegiatan tulis menulis kegiatan administrasi atau tata usaha dalam sumber daya kelautan dan perikanan

### **c. Pelaksanaan tugas pengawas perikanan di Kapal Perikanan**

Biasanya tugas pengawas perikanan pada kapal perikanan biasanya dilakukan Pelabuhan perikanan kegiatan patroli dilaut dilakukan oleh pengawasan dan menjadi tanggung jawab petugas perikanan mengetahui kinerja pengawas perikanan dalam melakukan patroli pengawasan dilakukan dengan menggunakan speedboat sebagai sarana untuk melakukan pengawasan di laut. (Aji et al., 2016)

Tugas pengawas perikanan dikapal perikanan di kapal perikanan pasal 8 huruf b yaitu :

1. Adanya Kapal Penangkapan Ikan
2. Adanya Kapal Pengangkut ikan
3. Adanya Kapal Yang Mengelola Hasil ikan
4. Adanya Kapal Latih ikan
5. Adanya Kapal Melakukan Kegiatan Penelitian
6. Adanya Kapal untuk operasi atau patroli penangkapan ikan atau budidaya ikan didalam kegiatan pengawasan dikapal perikanan

### **d. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan Pada Kapal Penangkapan ikan**

Kegiatan atau tugas pengawas perikanan tercantum pada ayat 1 yaitu :

1. Kelengkapan surat, Asli yang sesuai SIPI atau SIKPI surat laik operasi dan surat yang menyatakan persetujuan untuk berlayar

2. Dalam pengembangan perikanan harus adanya kesesuaian izin kelengkapan surat
3. Adanya Peralatan atau memiliki kamera pemantau agar bisa lanvar melakukan kegiatan pengawasan
4. Adanya Kapal Perikanan, alat tangkap untuk ikan
5. Adanya SDM atau anak buah kapal perikanan
6. Adanya bagian Pemantau atau monitoring didalam kapal penangkapan ikan sesuai dengan ukuran kapal
7. Adanya penanganan ikan sesuai dengan prosedur berlaku diatas kapal perikanan
8. Adanya prosedur yang sesuai untuk menangani ikan diatas kapal perikanan
9. Adanya Prosedur yang sesuai dengan berbagai jenis ikan yang ditangkap dengan SIKPI
10. Memiliki Pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan hasil yang ditangkap oleh nelayan .
11. Harus sesuai dengan daerah yang sudah diatur oleh SIPI
12. Jenis ikan yang harus diangkut dengan jenis ikan yang diperbolehkan untuk diangkut
13. Adanya Keaslian yang sesuai dengan sertifikat dan bentuk kriteria pada kepatuhan HAM pada Usaha Perikanan (Purwangka et al., 2019)

#### **e. Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan**

SLO yaitu surat keterangan yang berisi tentang administrasi kapal perikanan yang sudah memiliki syarat surat administrasi yang sudah layak untuk melakukan kegiatan perikanan di perairan sebagai acuan pengawasan perikanan, nahkoda atau pemilik operator kapal perikanan dan penanggung jawaban perusahaan perikanan dalam penerbitan SLO dalam melakukan kegiatan perikanan (PRIHADI AJI, SINGGIH, S.PI, 2017) standar pelayanan SOP pengawasan yang dilakukan PSDKP perikanan tangkap yaitu pemeriksaan administrasi dan dokumen, pemeriksaan fisik kapal secara teknis, jumlah ABK, daerah operasi yang sesuai di SLO untuk penangkapan ikan, alat tangkap yang digunakan ramah lingkungan atau tidak (Bilhuda et al., 2018)

#### **f. Syarat Ketentuan Dan Penerbitan SLO**

SLO diterbitkan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan dan administrative dan kelayakan teknis adapun persyaratan administrative yang harus bagi penangkapan kapal ikan yaitu :

##### **1. Persyaratan Administrasi (KEMENPAN, 2021)**

- a. SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) Asli
- b. SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter) Asli Untuk Penggunaan kapal ikan ukuran diatas 30 GT
- c. SLO (Surat Laik Operasi) yang sudah melakukan kegiatan aktivitas penangkapan ikan

- d. Keselarasan atau sesuai dengan pelabuhan pangkalan dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) (KEMENPAN, 2021)
2. **Persyaratan Kelayakan Teknis** (KEMENPAN, 2021)
- a. Kesesuaian atau keselarasan fisik kapal pendukung operasi pembudiyaaan ikan yang terdiri bahan kapal, merek pada kapal, nomor pada mesin utama kapal ,tanda selar pada kapal , dan nama atau julukan (panggilan)
- b. Kesesuaian atau keselarasan jumlah ikan yang akan diangkut dengan daya tampung tempat penyimpanan ikan
- c. Keaktifan transmitter pada SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) untuk mendukung kegiatan operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran diatas 30 GT (*Gross Tonnage*). (KEMENPAN, 2021)

#### 2.1.10 Pengertian Pelabuhan

Menurut C. Verlaque (1975) Pelabuhan laut adalah sesuatu tempat yang berlangsung atau terjadinya kontak antara transportasi atau alat kendaran melalui laut atau pun darat seperti mobil dan kereta api. (Lubis, 2019)

A. Vigarie mengatakan dan melengkapi definisi Menurut C. Verlaque (1975) yaitu bahwa pelabuhan yaitu suatu wilayah yang terjadi antara dua bidang atau sirkulasi daratan dan sirkulasi maritime (laut/perairan) Departemen Perhubungan Laut mengartikan pelabuhan adalah tempat berlabuh atau tempatnya sandaran kapal laut untuk menaikan dan

menurunkan penumpang kapal , adanya bongkar muat barang atau aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan tersebut .(Lubis, 2019)

Pengoperasian pelabuhan juga bisa dapat *feedback income* yang jika dikelola dengan baik diantaranya pelabuhan niaga , pelabuhan perikanan, atau pun pelabuhan lainnya karna pelabuhan memiliki fungsi yang komersial atau memiliki nilai jual beli pelabuhan secara tidak langsung akan menumbuhkan angka perekonomian kota .(Lubis, 2019)

### **2.1.11 Pengertian Pelabuhan Perikanan**

Pelabuhan Perikanan adalah pelabuhan khusus yang penggunaannya atau pemakaiannya digunakan untuk aktivitas sektor pertambangan atau pertanian, pelabuhan perikanan antara wilayah daratan dan wilayah lautan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sejak ikan didaratkan dan juga didistribusikan.(Lubis, 2019)

Menurut Alonze F.Quin dan Wj Guckian Pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perairan yang sudah terlindungi dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti bahan bakar, bengkel, dan alat pengangkut barang lainnya yang berhubungan dengan aktivitas perikanan.(Lubis, 2019)

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Untuk Bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca. Penelitian terdahulu ini juga bermanfaat dalam mengolah dan memecahkan masalah yang berpotensi timbul dari Judul Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan Di Pangkalan

PSDKP Kota Batam. Walaupun Lokus dan Fokus juga tidak sama tetapi dapat membantu peneliti untuk menemukan pemecahan masalah dalam Penelitian Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan di Satuan Pangkalan PSDKP Kota Batam dibawah ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca yaitu :

- 1) Penelitian Terdahulu oleh Ismajaya yang berjudul Tingkat konsekuensi bahaya pada aktivitas pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan di pos pelayanan Jakarta pada tahun 2019 penelitian ini dipublikasikan oleh Albacore Volume 3 No 1 penelitian menggunakan penelitian Deskriptif dengan metode *HIRA* hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kegiatan pengawasan yaitu kegiatan sebelum dilakukan pengawasan, kegiatan pengawasan saat kedatangan dan keberangkatan kapal pengangkut atau kapal penangkap ikan, dan kegiatan setelah dilakukan pengawasan. (Purwangka et al., 2019)
- 2) Penelitian terdahulu oleh singgih prihadi aji yang berjudul intensitas kerja pengawas perikanan pada aktivitas patroli laut pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di Jakarta pada tahun 2016 penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif numeric dengan metode HTA hierarchical task analysis volume 7 nomor 2 hasil penelitian ini menyimpulkan hasil dari pengawasan dari awal pelaksanaan pengawasan sampai akhir pelaksanaan pengawasan patroli di PSDKP membutuhkan sdm dan usaha kerja dalam melakukan pengawasan patroli laut karna

kurangnya sdm pengawasan yang memiliki potensi terjadinya kecelekaan dan instensitas kegiatan kerja yang sangat tinggi. (Aji et al., 2016)

- 3) Penelitian terdahulu oleh irliyani yang berjudul analisis kinerja pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) di pos pelayanan PSDKP pelabuhan perikanan samudera jakarta pada tahun 2017 volume 6 nomor 4 hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan metode purposive sampling atau pengambilan sampel hasil peneliitian menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pangkalan PSDKP jakarta sangat baik hal ini dapat dilihat dari score serviquial sangat kecil (Suroyya et al., 2017)
- 4) Penelitian terdahulu oleh dewi indri hapsari yang berjudul analisis kinerja satker pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan PSDKP di pelabuhan perikanan nusantara pelabuhan ratu sukabumi jawa barat pada tahun 2013 volume 2 nomor 1. Hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif berdasarkan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja di PSDKP dalam pengawasan dilaut kurang baik karena kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana tidak mendukung dalam melakukan pengawasan dilaut (Hapsari, 2013)
- 5) Penelitian terdahulu oleh stella anggityrini yang berjudul kinerja satker PSDKP pekalongan dilihat dari aspek perikanan tangkap di pelabuhan perikanan nusantara (ppn) pekalongan pada tahun 2013 volume 2 nomor 1 hasil penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode sample purposive hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja satuan

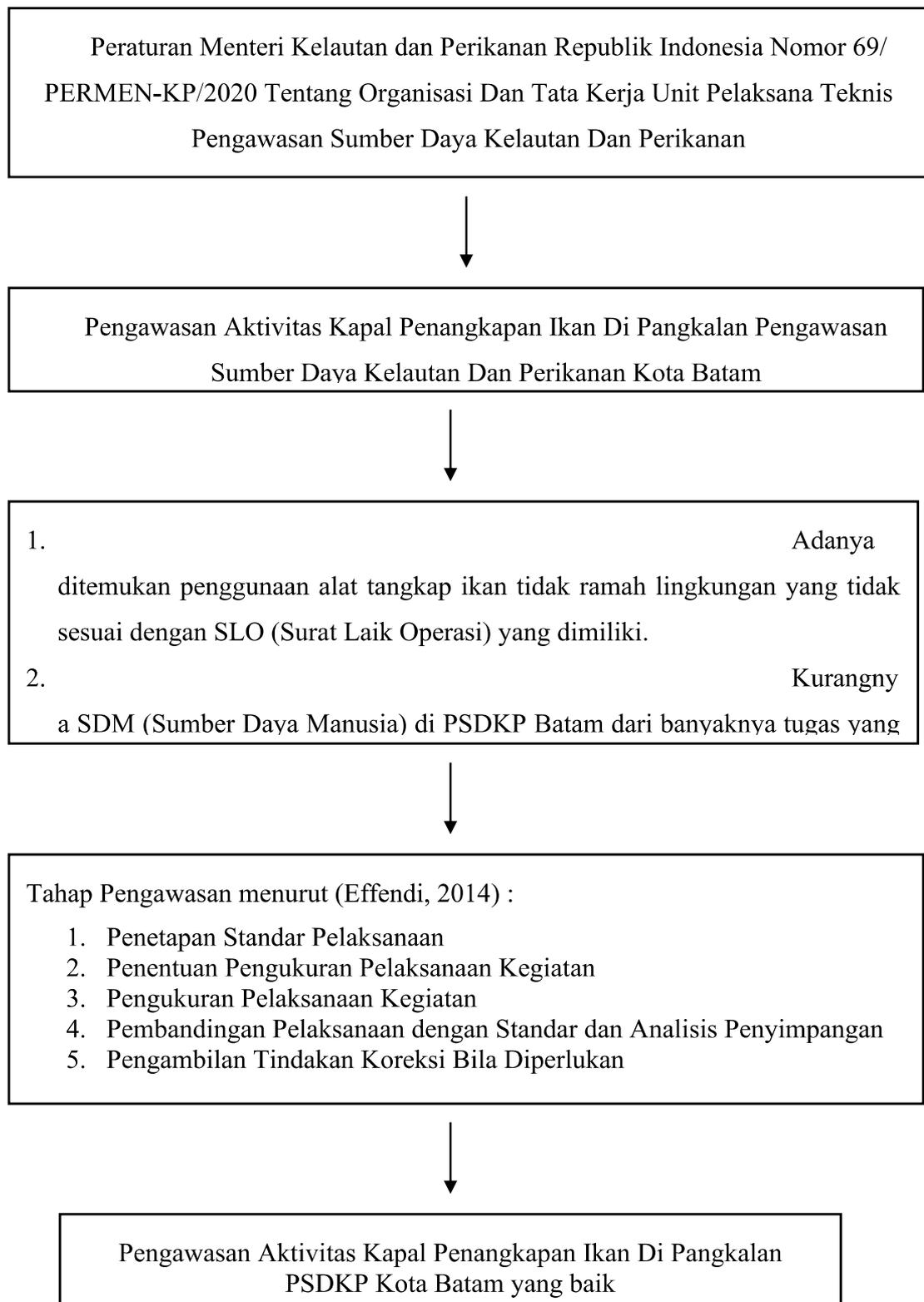
kerja PSDKP pekalongan dalam kualitas pelayanan terbilang sangat baik dengan nilai servqual yang kecil (Pelabuhan et al., 2013)

- 6) Penelitian terdahulu oleh Azhar Abbas yang berjudul Peran Pengawasan Ombudsman dalam Pelayanan Publik dilihat dari aspek pengawasan pada tahun 2020 ISSN 2528-3332 hasil penelitian ini membahas tentang peran pengawasan didalam suatu organisasi yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja apakah ada pelanggaran penyelewengan dan sejauh mana kebijakan atasan sudah dilakukan apakah berjalan sesuai rencana atau tidak.(Abbas, 2020)
- 7) Penelitian terdahulu oleh Adwani Sulaiman yang berjudul Peningkatan koordinasi Struktur Dalam Penegakan Hukum Ilegal Fishing Di Aceh pada tahun 2020 Vol 22 No 3 (Desember ,2020) ,pp.531-546 hasil penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap nelayan yang menangkap ikan secara illegal dan menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang akan merusak ekosistem yang ada dilaut (Sulaiman, 2018)
- 8) Penelitian terdahulu oleh Inda Santi yang berjudul Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Ilegal Fishing pada tahun 2019 Vol 3 No2 Hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif penelitian ini disimpulkan bahwa hambatan yang terjadi didalam pengawasan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang mendukung dalam melakukan operasi pengawasan karna banyaknya kapal asing yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan diperairan Tanjung

Pinang Kepulauan Riau dan melihat tindakan yang hanya teknis saja tetapi administrative keimigrasian yang ada di Tanjung Pinang. (Santi & Adhayanto, 2019)

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran dalam pembentukan suatu penelitian baik dari latarbelakang masalah, teori-teori pendukung penelitian, masalah-masalah yang teridentifikasi, serta analisis data yang dilakukan. Pada penelitian ini, kerangka pemikiran disajikan dalam bentuk diagram alur pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran